

Buku

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif dan Campuran ED.4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daniel, M. (2002). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Emzir. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, H. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2010). In W. Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhsin, A., Nafisah, L., & Siswanti, Y. (2019). *Surat Kekancingan Tanah Sultan Ground 'Upaya Mendapatkan izin Memanfaatkan Tanah Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Deepublish .
- Nirmalasari, R. (2014). *Penyalahgunaan Hak Pinjam Pakai Sultan Ground Oleh Masyarakat Kecamatan Kraton*. Universitas Negeri Yogyakarta: tidak dipublikasikan.
- Perangin, E. (1994). *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Adat Praktisi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Alfabeta: Bandung.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Soemardjan, S. (1991). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Taylor, & Bogdan. (1975). In L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Todaro, M. P. (2009). *Pembangunan Ekonomi : Edisi Kesebelas Jilid* . Jakarta: Erlangga.
- Vollenhoven, V. (1926). *Miskeningen van Het Adatrecht, Boekhandel en Drukkerij Voorheen*. Leiden.
- Vollenhoven, C. v. (1932). *De Indonesier en zijn grond / C van Vollenhoven*. Leiden: E. J. Brill.
- Waluya, B. (2007). *Sosiologi*. Bandung: PT Setia Purna Inves.
- Winardi, G. (2009). *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Jakarta: Kompas.
- Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal/Skripsi

- Bahrin, G, S. B., & S, A. P. (2008). Luas Lahan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. *Jurnal Penyuluhan 4*.
- Bank, A. D. (2020). *Safeguard Implementation Review for Infrastructure Projects in Southeast Asia*. Manila.
- Bank, W. (2018). *Indonesia: Land Acquisition and Involuntary Resettlement Policy Review*. Washington DC.
- Damayanti, V. S. (2021). Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Seksi 1 Paket 1.1: SOLO – KLATEN STA 0+000 – STA 22+300. *Kerja Praktik Institut Teknologi Sepuluh Nopember*.
- Hamsariadi. (2023). Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Dalam Pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli. *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.

dan Pembayaran Ganti Rugi Hak Atas Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang di Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Semarang). *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo*.

Kebijakan, P. S. (2021). *Masalah Keadilan Sosial dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta.

Kurniawan, R., & Fauzi, A. (2018). etimpangan Sosial dalam Praktik Pembebasan Lahan di Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 20, No. 1*.

Larasati, M. A., & Sujadi, S. (2021). Implications of the Law of Land Acquisition for Development in the Public Interest on Land Acquisition Conflict Resolution. *Jurnal Ilmiah Hukum, (24)2*, 281-296.

Pranoto, R., & Dini, A. (2019). Analisis Ketimpangan Sosial Pascapembebasan Lahan untuk Infrastruktur. *Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 21, No. 2*.

Prasetyo, H. (2020). Perilaku Konsumtif Masyarakat Penerima Ganti Rugi Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi Sosial, Vol. 8, No. 1*.

Putra, R. S. (2018). *Perencanaan Elevated Bridge Pada Ruas Jalan Tol Jakarta -Cikampek II Menggunakan Struktur Steel Box Girder Dengan Metode Double Truss Launcher Erection*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*.

Rahayu, D. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Mengawal Pemanfaatan Ganti Rugi Lahan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Vol. 6, No. 2*.

Siregar, M. (2022). Pelaksanaan Pembebasan Lahan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Skripsi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru*.

Jalan Tol. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM.*

Yuliyanto, A. (2018). Transformasi Sosial-Ekonomi Masyarakat Pasca Pembebasan Lahan untuk Infrastruktur. *Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 12, No. 1.*

Zahrani, A. N., Abdad, S. A., & Bangsawan, M. I. (2023). Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Jalan Tol (Tax on Location) dalam Pengaruh Ekosistem Lingkungan Lingkup Hukum Agraria. *Politik Hukum dan Demokrasi Menuju Pemilu 2024*, 82-91.

Dokumen

ATR/BPN. (2022). *Laporan Tahunan Kegiatan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional*. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Indonesia, B. K. (2016). *Naskah Akademik RUU Perubahan atas UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan*. Jakarta(ID): Pusat PUU BK DPR RI.

Keputusan Gubernur DIY Nomor 206 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kebijakan, P. S. (2021). *Masalah Keadilan Sosial dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 280/KPTS/M tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Margokaton Tahun Anggaran 2023

Nasional, K. A. (2022). *Laporan Tahunan Kegiatan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional*. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengaturan pertanahan untuk memberikan kekuasaan kepada Negara untuk menguasai tanah yang berada di wilayah teritorialnya



Kasultanan dan Tanah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas

Desa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menjelaskan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum